

Pengembangan Desain Koordinasi Melalui *Joint Work Plan* dalam Mengoptimalkan Program *Sponsorship* pada Bidang Pelayanan Anak di Yayasan Usaha Mulia Cianjur

Tesa Meliani^{1*}, Aribowo², Susilawati³,
^{1*,2,3}Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Email: tesameliani9@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1349 - 1359

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2637>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2637>

Article History:

Received: 19-07-2026

Revised: 31-07-2026

Accepted: 01-08-2026

Abstract : This research is motivated by the importance of coordination in humanitarian service organizations in order to integrate goals and activities between fields to achieve goals effectively and efficiently. This research aims to develop and pilot the coordination design through the Joint Work Plan (JWP) in the Sponsorship Program, especially in the field of child services at the Yayasan Usaha Mulia Cianjur (YUM). YUM Cianjur faces various coordination challenges, such as coordination mechanisms that are still informal, have not been systematically documented, limited human resources, and there is no joint work plan. The research uses a Participatory Action Research (PAR) approach by involving Project Managers, internal staffs, and external partners of YUM Cianjur in a participatory manner. Data collection was carried out through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), participatory observations, and documentation studies. Data analysis includes the collection, reduction, presentation, and drawing of conclusions. The development and testing of coordination design through JWP is carried out with the stages of design reflection, identification of needs, planning, implementation, evaluation, and refinement of the design. The results of the study show that the development of coordination design through JWP is able to clarify the division of roles and responsibilities, strengthen cross-field communication, improve program integration, create a more systematic and participatory coordination mechanism, and be able to increase the effectiveness of monitoring and evaluation of Sponsorship programs. The findings of this study have theoretical and practical implications for the importance of collaborative planning, structured communication in organizations, and network management in humanitarian service organizations so that coordination runs well. Thus, the JWP design is relevant to improve the quality of program management in Humanitarian Service Organization.

Keywords : Coordination, Joint Work Plan, Human Service Organization, Sponsorship, Children's Services

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan guna mengintegrasikan tujuan dan kegiatan antarbidang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengujicobakan desain koordinasi melalui *Joint Work Plan* (JWP) pada Program *Sponsorship*, khususnya pada bidang pelayanan anak di Yayasan Usaha Mulia Cianjur (YUM). YUM Cianjur menghadapi berbagai masalah koordinatif, seperti mekanisme koordinasi yang masih informal, belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya rencana kerja bersama. Penelitian menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan *Project Manager*, staff internal, dan mitra eksternal YUM Cianjur secara partisipatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengembangan dan ujicoba desain koordinasi melalui JWP dilakukan dengan tahapan refleksi desain, identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desain koordinasi melalui JWP mampu memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, memperkuat komunikasi lintas bidang, meningkatkan integrasi program, menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan partisipatif, serta mampu meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program *Sponsorship*. Temuan pada penelitian ini berimplikasi secara teoritis maupun praktis pada pentingnya perencanaan operasional, komunikasi yang terstruktur dalam organisasi, dan pengelolaan jaringan kerja dalam organisasi pelayanan kemanusiaan sehingga koordinasi

berjalan dengan baik. Dengan demikian, desain JWP relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program pada Organisasi Pelayanan Kemanusiaan.

Kata Kunci : Koordinasi, *Joint Work Plan*, *Organisasi Pelayanan Kemanusiaan*, *Sponsorship*, *Pelayanan Anak*

PENDAHULUAN

Organisasi pelayanan kemanusiaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai layanan sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Berbeda dengan organisasi profit, organisasi pelayanan kemanusiaan berfokus pada pemberian layanan dan pencapaian kesejahteraan sosial (Jannah et al., 2024). Indikator keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, membangun kolaborasi, serta mengoordinasikan berbagai aktivitas yang melibatkan banyak aktor. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan antarunit organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Handoko, 2003). Dalam organisasi pelayanan kemanusiaan, koordinasi menjadi aspek yang sangat penting karena program yang dijalankan umumnya melibatkan berbagai bidang layanan, pemangku kepentingan, serta jaringan kerja yang saling bergantung. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan tumpang tindih tugas, miskomunikasi, ketidakjelasan peran, hingga rendahnya efektivitas pelaksanaan program (Saputra, 2020). Oleh sebab itu, sistem dan mekanisme koordinasi dalam Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan harus dirancang secara jelas, terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga seluruh sumber daya internal maupun eksternal bisa bersinergi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan Organisasi. Salah satu organisasi pelayanan kemanusiaan yang menghadapi masalah koordinasi tersebut adalah Yayasan Usaha Mulia Cianjur.

Yayasan Usaha Mulia (YUM) Cianjur merupakan salah satu organisasi pelayanan kemanusiaan yang menyelenggarakan program *Sponsorship* pada bidang pelayanan anak melalui berbagai layanan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan penguatan kapasitas keluarga. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan semua staff internal maupun mitra eksternal YUM Cianjur sehingga membutuhkan koordinasi yang terencana dan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi sekaligus kolaborasi lintas sektor atau lintas bidang untuk memastikan adanya integrasi tujuan, penyesuaian peran, serta sinergi antaraktor yang terlibat (Akbar et al., 2024). Pentingnya koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan untuk mencapai target program sangatlah tinggi, kondisi dilapangan pelaksanaan program *Sponsorship* di YUM Cianjur masih menghadapi sejumlah kendala sehingga seluruh sumber daya Organisasi Pelayanan Kemanusiaan baik internal maupun eksternal harus bersinergi.

Penelitian ini berangkat dari hasil asesmen yang dilakukan peneliti ketika praktikum Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan (MOPK) pada tahun 2025 di YUM Cianjur. Pada kegiatan praktikum tersebut, fokus asesmen pada program *merchandise*. Hasil asesmen menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi pada program *sponsorship* YUM Cianjur masih menghadapi berbagai masalah di lapangan. Koordinasi yang dilakukan cenderung bersifat informal, belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedia rencana kerja bersama yang mengintegrasikan seluruh bidang, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi program. Koordinasi antar bidang dan mitra eksternal masih banyak dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat dibandingkan melalui perencanaan bersama yang terstruktur dan partisipatif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat integrasi lintas program/bidang dan pencapaian tujuan pelayanan anak (Saputra, 2020).

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengembangkan desain rekayasa teknologi pekerjaan sosial berupa *Joint Work Plan* (JWP) sebagai instrumen perencanaan dan koordinasi bersama. Meskipun asesmen dilakukan pada program yang berbeda, kebutuhan terhadap penguatan koordinasi yang ditemukan memiliki karakteristik yang serupa dengan berbagai program yang dijalankan organisasi pelayanan kemanusiaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan koordinasi yang terstruktur bukan hanya terjadi pada satu program tertentu, melainkan menjadi kebutuhan organisasi secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi sekaligus

pengembangan desain koordinasi yang dapat memperkuat keterpaduan kerja antarbidang dan antaraktor dalam pelaksanaan program *Sponsorship*.

Secara teoritis efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi yang terstruktur, mengembangkan jaringan kerja yang produktif, serta menyusun perencanaan yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya (Sugeng Pujileksono, Dwi Yuliani, Susilawati, 2023). Koordinasi yang efektif dapat diukur melalui empat indikator, yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, serta kesepakatan dan komitmen. Komunikasi berkaitan dengan tersedianya informasi dan media komunikasi yang mendukung kelancaran pertukaran informasi antar pihak. Kesadaran pentingnya koordinasi ditunjukkan oleh pemahaman dan kepatuhan pelaksana terhadap hasil koordinasi yang telah disepakati. Kompetensi partisipan mencerminkan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian yang sesuai dalam proses koordinasi. Sementara itu, kesepakatan dan komitmen ditunjukkan melalui adanya kesepakatan bersama mengenai tujuan, peran, dan mekanisme kerja serta konsistensi seluruh pihak dalam melaksanakan hasil koordinasi. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai efektivitas koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi (Handyaningrat, 2002).

Sejalan dengan hal tersebut, teori koordinasi menekankan pentingnya sinkronisasi tujuan, kejelasan peran, komunikasi timbal balik, dan keberlanjutan proses koordinasi sebagai syarat terciptanya kerja sama yang efektif dalam organisasi (Afrita et al., 2022). Sementara itu, teori perencanaan operasional menjelaskan bahwa pencapaian tujuan bersama memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program (Sufianti, 2011). Selain dipengaruhi oleh proses koordinasi dan perencanaan operasional, efektivitas pelaksanaan program juga dapat dipahami melalui perspektif hubungan atau koneksi antaraktor yang terlibat dalam organisasi.

Perspektif teori jaringan sosial mengungkapkan bahwa sekumpulan unit sosial yang saling terhubung dan berinteraksi sehingga membentuk suatu jaringan kerja. Jaringan sosial bisa diartikan sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki batas atau sempadan antara unit satu dengan unit lainnya (Streeter, C. L., & Gillespie, 2008). Oleh karena itu, keberhasilan suatu program seperti *Sponsorship* tidak hanya ditentukan oleh kapasitas masing-masing bidang/unit, tetapi juga kualitas hubungan, komunikasi, interaksi, dan koordinasi yang baik antara unit-unit tersebut. Hal ini diperkuat dengan teori komunikasi organisasi yang termuat dalam buku yang berjudul komunikasi organisasi (Robert Tua Siregar, 2021) menjelaskan bahwa komunikasi organisasi pada dasarnya merupakan proses pertukaran informasi, interaksi, dan pengorganisasian perilaku di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa koordinasi yang efektif memerlukan dukungan jaringan kerja yang kuat, komunikasi, serta mekanisme perencanaan yang kolaboratif dan partisipatif sehingga mampu menghubungkan berbagai pihak yang terlibat dalam program *Sponsorship*. Pentingnya hubungan, komunikasi, dan koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan juga telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya.

Pentingnya koordinasi juga dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan terhadap efektivitas organisasi. Menurut (Handyaningrat, 2002) koordinasi yang efektif ditunjukkan melalui komunikasi yang baik, kesadaran akan pentingnya koordinasi, keterlibatan partisipan yang kompeten, serta adanya kesepakatan dan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan. Apabila koordinasi berjalan dengan baik, organisasi akan memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab, komunikasi yang lebih efektif, peningkatan akuntabilitas, serta kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan program secara efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi menjadi kebutuhan penting bagi organisasi pelayanan kemanusiaan yang melibatkan banyak aktor dan sumber daya dalam pelaksanaan program (Limantoro et al., 2015).

Penelitian terdahulu telah mengkaji koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Zacharias, 2016), (Nurwahyuliningsih & Nulhaqim, 2021), (Dody Hermana, 2020), (Nursolih et al., 2024), (Saputra, 2020), (Deswimar, 2018) menunjukkan bahwa komunikasi dan kemitraan sangat penting dalam koordinasi organisasi kemanusiaan. Namun, studi-studi tersebut umumnya masih berfokus pada analisis proses dan belum menghasilkan

instrumen operasional.. Namun, organisasi memerlukan mekanisme terintegrasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan (Ariyanto, 2018). Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya pengembangan sekaligus uji coba desain koordinasi yang dapat diterapkan secara langsung dalam praktik manajemen organisasi.

Berdasarkan kebutuhan dan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengujicobakan desain koordinasi melalui *Joint Work Plan (JWP)* pada program *Sponsorship* di Yayasan Usaha Mulia Cianjur. Prosesnya dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari refleksi desain awal, identifikasi kebutuhan, penyusunan rancangan, implementasi, hingga evaluasi untuk menghasilkan desain akhir. Melalui pendekatan rekayasa teknologi pekerjaan sosial yang divalidasi oleh akademisi dan praktisi, JWP disusun secara partisipatif sebagai dokumen rencana kerja bersama yang memuat tujuan, pembagian peran, rencana kegiatan, indikator capaian, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya ilmu pekerjaan sosial khususnya Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan dengan memperkuat kajian terkait koordinasi, perencanaan operasional, jaringan sosial, dan komunikasi organisasi, sekaligus menjadi referensi akademik model koordinasi yang sistematis dan kolaboratif. Secara praktis, penelitian ini menjadi acuan operasional bagi Yayasan Usaha Mulia Cianjur untuk meningkatkan efektivitas Program *Sponsorship* melalui penerapan *Joint Work Plan* yang terstruktur guna memperjelas pembagian tugas, memperkuat kolaborasi, serta mengintegrasikan monitoring dan evaluasi. Selain itu, desain ini dapat direplikasi oleh organisasi kemanusiaan lain dengan kendala koordinasi serupa.

Lokasi implementasi Desain *Joint Work Plan (JWP)* pada penelitian ini dilakukan pada Program *Sponsorship* di YUM Cianjur, desain *Joint Work Plan (JWP)* ini bersifat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai organisasi kemanusiaan yang membutuhkan integrasi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pengembangan desain rekayasa teknologi pekerjaan sosial JWP telah diuji validasi dengan tenaga ahli baik akademisi maupun praktisi yang relevan dengan Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Rekayasa teknologi pekerjaan sosial ini telah divalidasi oleh akademisi dan praktisi. Kebaruan penelitian ini terletak pada peran JWP sebagai instrumen partisipatif yang mengintegrasikan seluruh lini internal (pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, PT YUM Utama Makmur) dan mitra eksternal. Sebagai dokumen rencana kerja bersama, JWP memuat tujuan, pembagian peran, rencana kegiatan, indikator capaian, serta mekanisme evaluasi untuk memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal secara terpadu.

Pengembangan desain pada penelitian ini berdasarkan pada identifikasi kebutuhan YUM Cianjur akan suatu mekanisme koordinasi yang mampu mengintegrasikan berbagai pihak/aktor, sumber daya, dan kepentingan dalam pelaksanaan program *Sponsorship*. Koordinasi yang terstruktur diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperjelas peran, serta memperkuat sinergi organisasi (Imelda, 2023). Oleh karena itu, melalui pengembangan dan penerapan desain *Joint Work Plan* diharapkan koordinasi yang bersifat horizontal atau vertikal yang dilakukan oleh staff internal maupun mitra eksternal YUM Cianjur dapat berjalan lebih sistematis, partisipatif, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan program pada bidang pelayanan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Participatory Action Research (PAR)* untuk mengembangkan dan mengujicobakan desain koordinasi melalui *Joint Work Plan (JWP)* pada Program *Sponsorship* bidang pelayanan anak di Yayasan Usaha Mulia (YUM) Cianjur. Metode PAR dipilih karena memungkinkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam pengembangan pemikiran, diskusi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif (Pujileksono et al., 2023). Tahapan PAR dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan refleksi desain, identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan desain. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan jumlah 12 informan yang terdiri dari *Project Manager*, *Project Officer* program *Sponsorship* sekaligus pekerja sosial, staf bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, serta mitra eksternal yang terlibat

dalam program *Sponsorship*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dilakukan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul dari proses pengumpulan dan analisis data. Pembahasan tidak hanya mendeskripsikan temuan penelitian, namun juga menginterpretasikan makna dari temuan tersebut dengan mengaitkan pada teori, konsep, hasil temuan penelitian dan menarik kesimpulan. Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pengembangan desain koordinasi melalui *Joint Work Plan* dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan pelaksanaan Program *Sponsorship* pada bidang pelayanan anak di YUM Cianjur. Hasil dan pembahasan penelitian ini disajikan berdasarkan tema-tema sebagai berikut :

1. Refleksi Desain Awal dan Identifikasi Kebutuhan Desain Koordinasi pada Program *Sponsorship*

Pada tahap ini teridentifikasi beberapa tantangan koordinasi khususnya pada program *sponsorship*. Pada tahap refleksi dan identifikasi kebutuhan desain koordinasi yang telah berjalan menunjukkan masih terdapat beberapa masalah yang memengaruhi efektivitas koordinasi program. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan Program *Sponsorship* menunjukkan bahwa koordinasi masih cenderung bersifat informal, tidak terstruktur, dan dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan yang muncul pada saat tertentu. Proses koordinasi lebih banyak mengandalkan komunikasi melalui percakapan langsung, telepon, maupun grup *WhatsApp* tanpa adanya jadwal koordinasi yang rutin dan mekanisme yang terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi sering kali bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, sehingga belum mampu mendukung perencanaan dan pelaksanaan program secara optimal.

Kebutuhan pengembangan desain lainnya karena belum tersedianya dokumen kerja bersama yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program mengakibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, target kegiatan, serta mekanisme pelaporan belum terdefinisi secara jelas. Akibatnya, setiap bidang atau pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai prioritas kegiatan, alur kerja, maupun perannya dalam mendukung Program *Sponsorship*. Kondisi ini memicu perbedaan pemahaman, tumpang tindih kegiatan, serta keterlambatan informasi. Sejalan dengan Handyaningrat (2002), indikator komunikasi belum berjalan optimal karena ketiadaan sistem informasi yang menjamin kesamaan data bagi seluruh pelaksana. Temuan ini menegaskan bahwa koordinasi organisasi kemanusiaan tidak cukup mengandalkan komunikasi informal, melainkan membutuhkan desain koordinasi terstruktur dan terintegrasi sebagai acuan bersama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan memerlukan mekanisme yang sistematis, terencana, dan terintegrasi. Koordinasi tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi informal, tetapi membutuhkan pedoman yang mampu menyelaraskan tujuan, peran, dan aktivitas seluruh pihak yang terlibat. Temuan ini sejalan dengan teori koordinasi yang menekankan pentingnya sinkronisasi kegiatan, kejelasan peran, komunikasi yang berkelanjutan, dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan desain koordinasi yang dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan Program *Sponsorship* di YUM Cianjur.

2. Perencanaan Pengembangan Desain Koordinasi melalui *Joint Work Plan*

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tahap refleksi desain dan identifikasi kebutuhan yang dilakukan secara partisipatif oleh peneliti bersama para pemangku kepentingan YUM Cianjur. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan dan mengujicobakan desain koordinasi melalui *Joint Work Plan* (JWP). Pada tahap ini peneliti juga melakukan perencanaan

pengembangan desain JWP secara partisipatif dengan melibatkan *Project Manager*, *Project Officer*, staf bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, admin *Project Manager* (VTC) dan mitra eksternal. Desain *Joint Work Plan* (JWP) yang dikembangkan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu :

Tabel 1. Perencanaan Pengembangan Desain *Joint Work Plan* (JWP)

Komponen JWP	Fungsi dan Tujuan
Tujuan Bersama	Menyelaraskan arah dan target program <i>Sponsorship</i>
Pembagian Peran dan Tanggungjawab	Memperjelas pembagian tugas dan tanggungjawab setiap pihak
Rencana Kegiatan	Menjadi acuan pelaksanaan program
Indikator Capaian	Mengukur keberhasilan program
Monitoring dan Evaluasi	Memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana

Sumber : Hasil olah data penelitian 2026

Keunikan desain *Joint Work Plan* (JWP) terletak pada integrasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam satu dokumen kerja partisipatif. Lebih dari sekadar dokumen administratif, JWP berfungsi sebagai instrumen koordinasi yang disepakati bersama oleh berbagai bidang dan mitra eksternal seperti yang diujicobakan pada Program *Sponsorship* YUM Cianjur. Pengembangan JWP didasarkan pada keterkaitan fungsi antarbidang yang saling bergantung. Oleh karena itu, JWP tidak hanya berfokus pada pembagian tugas, tetapi juga menguatkan tata kelola (*governance*) organisasi melalui kejelasan alur komunikasi, hubungan kerja, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas program. Temuan ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan (Ansell & Gash, 2008) bahwa penyelesaian permasalahan yang melibatkan banyak aktor membutuhkan proses kolaborasi yang dibangun melalui dialog, komitmen bersama, dan pemahaman bersama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks Program *Sponsorship*, *Joint Work Plan* berfungsi sebagai media yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dan fungsi kerja ke dalam satu kerangka operasional yang disepakati bersama.

3. Implementasi *Joint Work Plan* pada Program *Sponsorship*

- a. Perencanaan operasional yang melibatkan *Project Manager*, *Project Officer Sponsorship*, staf bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, bendahara, dan Admin *Project Manager* (VTC).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai permasalahan koordinasi yang selama ini terjadi serta merumuskan kebutuhan pengembangan desain yang dapat mendukung optimalisasi Program *Sponsorship*.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa koordinasi yang selama ini berlangsung masih bersifat parsial, tidak terjadwal, dan belum memiliki pedoman bersama yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program. Melalui forum ini, para peserta berhasil mengidentifikasi hambatan koordinasi, menyelaraskan tujuan program, serta merumuskan kebutuhan akan suatu sistem koordinasi yang lebih terintegrasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai pihak sejak tahap perencanaan mampu menciptakan kesamaan persepsi dan komitmen dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif perencanaan operasional, keterlibatan aktor yang beragam dalam proses perencanaan merupakan langkah penting untuk membangun rasa memiliki (*ownership*) serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarunit kerja.

- b. Penyusunan *Joint Work Plan* (JWP)

Tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen *Joint Work Plan* (JWP) sebagai instrumen utama dalam pengembangan desain koordinasi. Penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh bidang yang berkaitan dengan Program *Sponsorship* dan

dikoordinasikan oleh *Project Officer Sponsorship*. Dokumen JWP yang dihasilkan memuat daftar kegiatan program, jadwal pelaksanaan, pembagian peran dan tanggung jawab setiap bidang, penunjukan penanggung jawab kegiatan (*person in charge*), indikator keberhasilan program, serta keterlibatan mitra eksternal yang relevan. Dengan adanya dokumen tersebut, setiap pihak memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil ini menunjukkan bahwa JWP berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat integrasi kerja yang mampu menyelaraskan berbagai aktivitas program ke dalam satu kerangka kerja bersama. Temuan ini sejalan dengan teori koordinasi yang menekankan pentingnya kejelasan peran, pembagian tugas, dan sinkronisasi kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

c. Kesepakatan Bersama dan Penguatan Mekanisme Koordinasi

Setelah JWP disusun, seluruh pihak melakukan validasi dan penyelarasan peran, jadwal, alur koordinasi, serta mekanisme kerja sama dengan mitra eksternal. Proses ini juga menyepakati penggunaan media komunikasi seperti rapat rutin, *grup WhatsApp*, telepon, *Google Drive*, dan laporan tertulis sebagai sarana koordinasi dan dokumentasi. Kesepakatan ini menjadi landasan terbangunnya sistem koordinasi yang disiplin, terstruktur, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas koordinasi membutuhkan komitmen kolektif serta kejelasan alur dan media komunikasi untuk meminimalkan miskomunikasi dan memperlancar pertukaran informasi.

d. Implementasi *Joint Work Plan* dalam Pelaksanaan Program

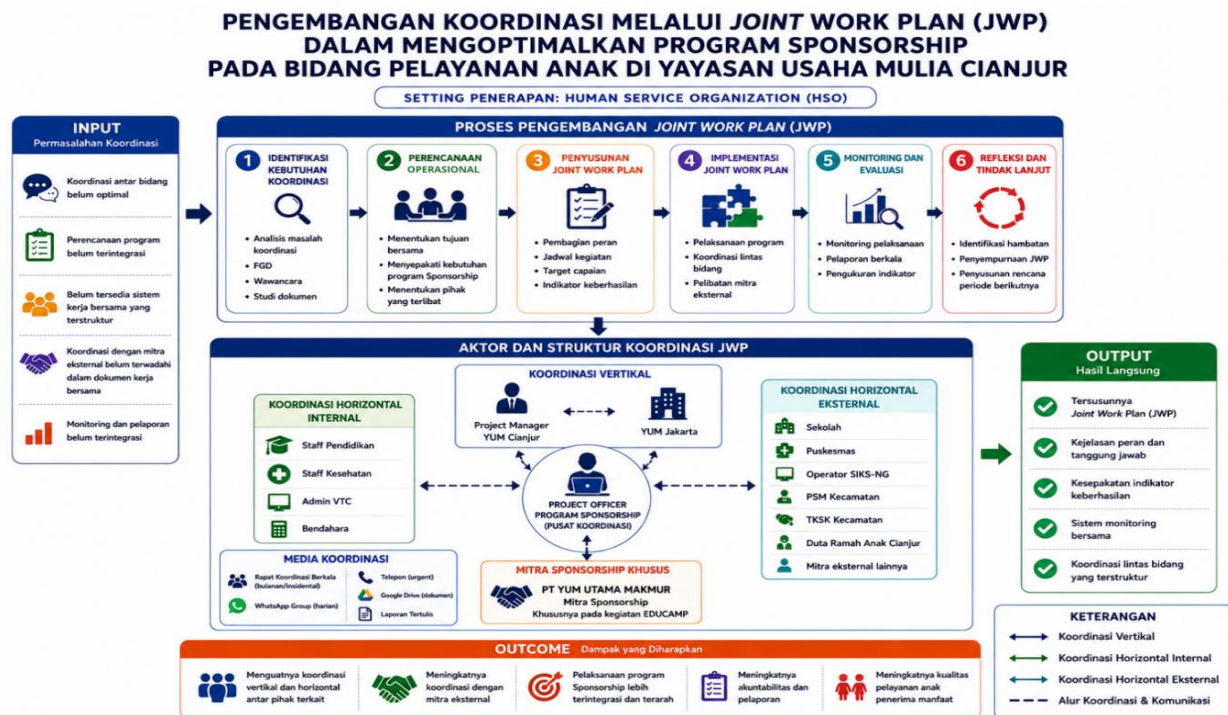
Implementasi JWP dilakukan melalui berbagai kegiatan Program *Sponsorship* yang melibatkan koordinasi internal maupun eksternal. Salah satu implementasi yang dilakukan adalah koordinasi dengan mitra eksternal, seperti Operator Program Indonesia Pintar (PIP) SMPN 1 Sukaresmi, Operator SIKS-NG Desa Cibadak, dan Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Sukaresmi. Koordinasi ini menghasilkan kolaborasi dalam kegiatan sosialisasi terkait PIP dan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada orang tua anak penerima manfaat. Selain itu, implementasi JWP juga diterapkan pada kegiatan distribusi bantuan kepada anak penerima manfaat dan pelaksanaan *sharing session* atau *capacity building* bagi anak-anak *Sponsorship*. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan pembagian peran, jadwal, dan mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan dalam JWP. Hasil implementasi menunjukkan bahwa koordinasi antarbidang menjadi lebih terarah dan sistematis. Setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, keterlibatan mitra eksternal menjadi lebih terstruktur karena telah memiliki peran dan mekanisme koordinasi yang jelas dalam mendukung program. Temuan ini mendukung teori jaringan sosial yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan dan kolaborasi antaraktor. Melalui JWP, hubungan kerja antaraktor tidak hanya menjadi lebih terorganisasi, tetapi juga pe mekanisme komunikasi yang terstruktur, serta keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Program *Sponsorship*. Sebagai instrumen koordinasi, JWP memuat tujuan program, pembagian tugas, jadwal pelaksanaan kegiatan, indikator capaian, serta mekanisme pelaporan yang disepakati bersama. Keberadaan dokumen tersebut memberikan pedoman kerja yang sama bagi seluruh pihak sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Ditinjau dari indikator koordinasi menurut (Handyaningrat, 2002). Implementasi JWP memberikan dampak positif terhadap aspek komunikasi. Sebelum pengembangan desain, komunikasi lebih banyak berlangsung secara informal dan bergantung pada kebutuhan masing-masing

bidang. Setelah JWP diterapkan, mekanisme komunikasi menjadi lebih terstruktur melalui rapat koordinasi berkala, grup komunikasi daring, laporan kegiatan, serta penggunaan dokumen kerja bersama. Kondisi tersebut meningkatkan kesamaan informasi, mempercepat pertukaran informasi antarbidang, serta mengurangi risiko terjadinya miskomunikasi dalam pelaksanaan program.

- A. Aspek kesadaran pentingnya koordinasi, JWP mendorong terbentuknya pemahaman bersama mengenai tujuan Program *Sponsorship* dan keterkaitan tugas antarbidang. Setiap pihak memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusinya terhadap pencapaian tujuan program sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap hasil koordinasi dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Peningkatan kesadaran tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas yang lebih terintegrasi dan mengurangi kecenderungan bekerja secara sektoral.
- B. Kompetensi partisipan, JWP memberikan ruang keterlibatan yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Keterlibatan *Project Manager*, *Project Officer Sponsorship*, staf program, serta mitra eksternal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan program. Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh komunikasi, tetapi juga oleh keterlibatan aktor yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang relevan.
- C. Kesepakatan dan komitmen, implementasi JWP menghasilkan kesepahaman bersama mengenai pembagian tugas, jadwal kegiatan, target capaian, dan mekanisme pelaporan. Kesepakatan yang terdokumentasi tersebut memperkuat komitmen pelaksanaan program karena setiap pihak memahami peran, tanggung jawab, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berlangsung pada tingkat komunikasi, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pelaksanaan tugas sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Handayani, 2002) dan konsep *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menegaskan bahwa efektivitas koordinasi memerlukan komunikasi intensif, kesadaran, komitmen kolektif, dan tujuan bersama. Dalam Program *Sponsorship*, JWP terbukti efektif menghubungkan berbagai aktor ke dalam satu kerangka operasional yang terintegrasi. Secara keseluruhan, JWP tidak hanya relevan bagi YUM Cianjur, tetapi juga potensial direplikasi oleh organisasi kemanusiaan lainnya sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola, komunikasi, pembagian peran, serta pencapaian tujuan program secara berkelanjutan.

4. **Evaluasi dan Penyempurnaan Desain Akhir *Joint Work Plan* terhadap Koordinasi Program**
Evaluasi implementasi JWP menunjukkan tiga perubahan positif utama: pembagian peran menjadi lebih jelas sehingga mencegah penumpukan beban kerja, komunikasi antarbidang berlangsung lebih sistematis, serta monitoring dan evaluasi program menjadi lebih terarah dengan indikator keberhasilan yang jelas. Secara teoritis, temuan ini memperkuat keterkaitan antara teori koordinasi, komunikasi organisasi, dan perencanaan operasional. JWP terbukti efektif sebagai instrumen integratif yang menyelaraskan tujuan dan membentuk mekanisme kerja bersama yang terstruktur, menegaskan bahwa keberhasilan koordinasi sangat ditentukan oleh adanya sistem yang mengatur kolaborasi secara berkelanjutan.

Gambar Desain Akhir Koordinasi *Joint Work Plan*

(Sumber: Hasil olah data penelitian 2026)

Gambar diatas menyajikan desain akhir koordinasi Program *Sponsorship* berbasis *Joint Work Plan* (JWP) di YUM Cianjur. Desain ini mengintegrasikan koordinasi vertikal (arahan kebijakan YUM Jakarta kepada *Project Manager* YUM Cianjur) dan koordinasi horizontal (sinergi antar-staf bidang pendidikan, kesehatan, admin VTC, PO *Sponsorship*, bendahara, serta mitra eksternal). Output utama yang dihasilkan meliputi dokumen JWP terpadu, kejelasan peran, komunikasi terstruktur, serta penguatan kolaborasi antar unit dan mitra. *Outcome* yang diharapkan adalah terwujudnya sistem koordinasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan pelayanan serta kesejahteraan anak penerima manfaat.

IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Implikasi hasil penelitian mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Joint Work Plan* (JWP) dapat digunakan sebagai model koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang fungsi dan peran yang berbeda. Temuan ini memperkuat konsep koordinasi berbasis perencanaan operasional yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Keberadaan JWP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengintegrasikan tujuan, peran, mekanisme komunikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam satu kerangka kerja yang terstruktur. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori koordinasi dengan menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi tidak hanya bergantung pada interaksi antar individu atau unit kerja, tetapi juga memerlukan mekanisme kerja bersama yang jelas dan terdokumentasi.

Temuan ini juga memperkuat teori perencanaan operasional yang menempatkan partisipasi dan kesepakatan antaraktor sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program (Sufianti, 2011). Dari perspektif teori komunikasi organisasi, Arnold dan Feldman (1986) dalam (Hidayat et al., 2022), penelitian ini menegaskan bahwa sistem komunikasi yang terstruktur mampu mendukung koordinasi yang lebih efektif dibandingkan komunikasi yang bersifat informal dan tidak terstruktur. Sementara itu, dari perspektif jaringan sosial (Streeter, C. L., & Gillespie, 2008), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hubungan antaraktor

secara sistematis melalui JWP dapat memperkuat kolaborasi, memperlancar aliran informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Secara praktis, penelitian ini memberikan alternatif solusi bagi organisasi pelayanan kemanusiaan dalam mengatasi berbagai permasalahan koordinasi yang sering muncul akibat tumpang tindih peran, kurangnya komunikasi, dan belum adanya perencanaan bersama yang terintegrasi. Penerapan JWP dapat menjadi pedoman dalam menyelaraskan kegiatan antarunit kerja dan mitra program sehingga pelaksanaan program menjadi lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, JWP dapat dijadikan sebagai model koordinasi yang adaptif untuk mendukung pengelolaan program pelayanan anak maupun program sosial lainnya yang melibatkan banyak pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desain koordinasi melalui *Joint Work Plan* (JWP) mampu menjawab kebutuhan Yayasan Usaha Mulia (YUM) Cianjur terhadap sistem koordinasi yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan Program *Sponsorship* bidang pelayanan anak. Desain JWP yang dikembangkan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) menghasilkan mekanisme koordinasi yang menekankan kejelasan tujuan, pembagian peran dan tanggung jawab, komunikasi formal, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Implementasi JWP terbukti memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal, meningkatkan komunikasi lintas bidang dan mitra eksternal, serta mendukung pengelolaan program yang lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa JWP dapat menjadi model koordinasi yang relevan bagi organisasi pelayanan kemanusiaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program dan layanan kepada penerima manfaat. Yayasan Usaha Mulia Cianjur disarankan mengintegrasikan JWP ke dalam kebijakan atau prosedur operasional organisasi agar implementasinya berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem koordinasi berbasis digital untuk mendukung dokumentasi, komunikasi, serta monitoring dan evaluasi program. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak implementasi JWP terhadap *outcome* program dan kualitas layanan penerima manfaat, serta menguji penerapan desain ini pada organisasi pelayanan kemanusiaan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan, serta para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama pelaksanaan penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Usaha Mulia (YUM) Cianjur, khususnya *Project Manager*, *Project Officer* Program *Sponsorship*, staf bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, serta seluruh mitra yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data dan implementasi penelitian. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, D., Siregar, R. L. V., Jaya, N. H., & Osira, Y. (2022). *Intervensi Manajemen Organisasi Pelayanan Sosial Pada Komunitas “Generasi Inklusi” (Genik) Kota Bengkulu*. 1(1), 1–12.
- Akbar, A. A., Dwiningtias, H., & Rahmat, H. K. (2024). *Urgensi Koordinasi dalam Organisasi Tanggap Darurat Bencana di Indonesia : Sebuah Tinjauan Pustaka*. 1(1), 15–20.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*.
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161.

- <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- Deswimar, D. (2018). Pengaruh Koordinasi Vertikal Dan Horizontal Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai Uin Suska Riau. *Jurnal EL-RİYASAH*, 8(2), 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v8i2.4410>
- Dody Hermana, U. C. B. (2020). Komunikasi dalam organisasi. *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*, 1(1), 1–218.
- Handyaningrat, S. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Hidayat, H., Anggraini, L., Ridha, M., Sami'an, S., & Swarnawati, A. (2022). Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Dan Gaya Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pts Di Riau. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1846>
- Imelda, J. D. (2023). Model Perencanaan Strategis Dalam Human Service Organization: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i1.1007>
- Jannah, B. U., Mufidah, A. N., & Jayanti, D. (2024). Koordinasi Sebagai Indikator dalam Organisasi Pendidikan. *Cermin Jurnal*, 3(2), 36–39. <https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/cjmp>
- Limantoro, F., Gede, I., Widyadana, A., & Palit, H. C. (2015). Model Koordinasi Logistik Kemanusiaan di Indonesia dengan Melibatkan Sektor Swasta. *Model Koordinasi Logistik Kemanusiaan Di Indonesia Dengan Melibatkan Sektor Swasta / Jurnal Titra*, 3(2), 115–122.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nursolih, E., Rustendi, E., & Lisara, A. (2024). *DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Perusahaan UMKM Se-Kota Banjar)*. 06(01), 17–24.
- Nurwahyuliningsih, E., & Nulhaqim, S. A. (2021). *Analisis Kompetensi Peran Pemimpin dalam Memberikan Pelayanan Sosial di LKSA Panti Asuhan Masyithoh Kota Lubuklinggau*. 7(1), 21–30.
- Pujileksono, S., Yuliani, D., Susilawati, & Kartika, T. (2023). *Riset Terapan Pekerjaan Sosial*. In. Robert Tua Siregar. (2021). *Komunikasi Organisasi*.
- Saputra, W. E. (2020). Pengaruh pengorganisasian dan koordinasi terhadap kinerja pegawai pada kementerian agama kabupaten ogan komering ulu timur wahid. 04(02), 1–11.
- Streeter, C. L., & Gillespie, D. F. (2008). Social Network Analysis. In *Social Network Analysis. Journal of Social Service Research* (Issue January). <https://doi.org/10.1300/J079v16n01>
- Sufianti, E. (2011). Perencanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(3), 322–329.
- Sugeng Pujileksono, Dwi Yuliani, Susilawati, T. K. (2023). *Riset Terapan Pekerjaan Sosial* (Pertama, Vol. 7, Issue 1). Intrans Publishing.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zacharias, T. (2016). *Efektivitas Desain Organisasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Dalam Tinjauan Pengelolaan Elemen Strategi*. 2.